



Realisasi Belanja Tembus Rp1 Triliun

REALISASI belanja APBN di wilayah pembayarannya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kapuas Hulu



Sri Winarno

untuk Agustus 2024 sudah tembus Rp1 triliun atau Rp1.297,79 miliar atau 63,72 persen dari pagu Rp2.036,64 miliar. Realisasi tersebut terdiri belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp216,71 miliar atau 57,2 persen dari pagu Rp378,87 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1.081,07 miliar atau 65,21 persen dari pagu Rp1.657,76 miliar. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno (27/9).

Sri Winarno merincikan realisasi APBN hingga 31 Agustus 2024 bahwa capaian pendapatan negara sebesar Rp156,13 miliar atau naik 9,9 persen dibandingkan tahun lalu, kemudian belanja pemerintah pusat sebesar Rp216,71 miliar naik 30,4 persen, Transfer Ke Daerah Rp1.081,07 miliar atau naik 17,3 persen dari tahun lalu sehingga pada periode ini terjadi defisit sebesar Rp1.141,65 miliar.

Sri Winarno juga mengingatkan kembali pentingnya implementasi transaksi nontunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran.

"Terdapat 12 satker yang belum menggunakan CMS (Cash Management System) agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS. Hal ini juga sebagai evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan CMS," katanya.

Implementasi transaksi nontunai oleh satker K/L pengelola APBN di Kapuas Hulu juga masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 5 satker transaksinya mencapai Rp422,44 juta, sedangkan pengguna Digipay baru 4 satker dengan transaksi sebanyak 84 transaksi sebesar Rp33,36 juta. Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru dilakukan pada 21 rekening virtual atau 67,74 persen sampai akhir Agustus 2024 ini.

"Kontribusi satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi nontunai diharapkan dapat ditingkatkan terus walaupun berada di daerah perbatasan NKRI, khususnya satker-satker yang memiliki pagu belanja relatif besar," kata Sri.

Sri menjelaskan, progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga Agustus 2024 merujuk data dari BKAD terlihat realisasi pendapatan mencapai Rp1.157,03 miliar atau 62,66 persen, yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.002,78 atau 57,62 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp972,65 miliar atau 52,66 persen, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 49,94 persen.

"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 63,72 persen yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi 52,66 persen belanja daerah dari APBD masih lebih rendah," ujar Sri.

Lanjut Sri, realisasi belanja APBD masih didominasi oleh komponen belanja Operasi sebesar Rp654,88 miliar atau 54,41 persen yang terdiri dari belanja pegawai realisasinya sebesar 64,15 persen, kemudian belanja barang dan jasa 46,17 persen, belanja hibah 37,34 persen serta untuk belanja bansos 17,91 persen. (fik)